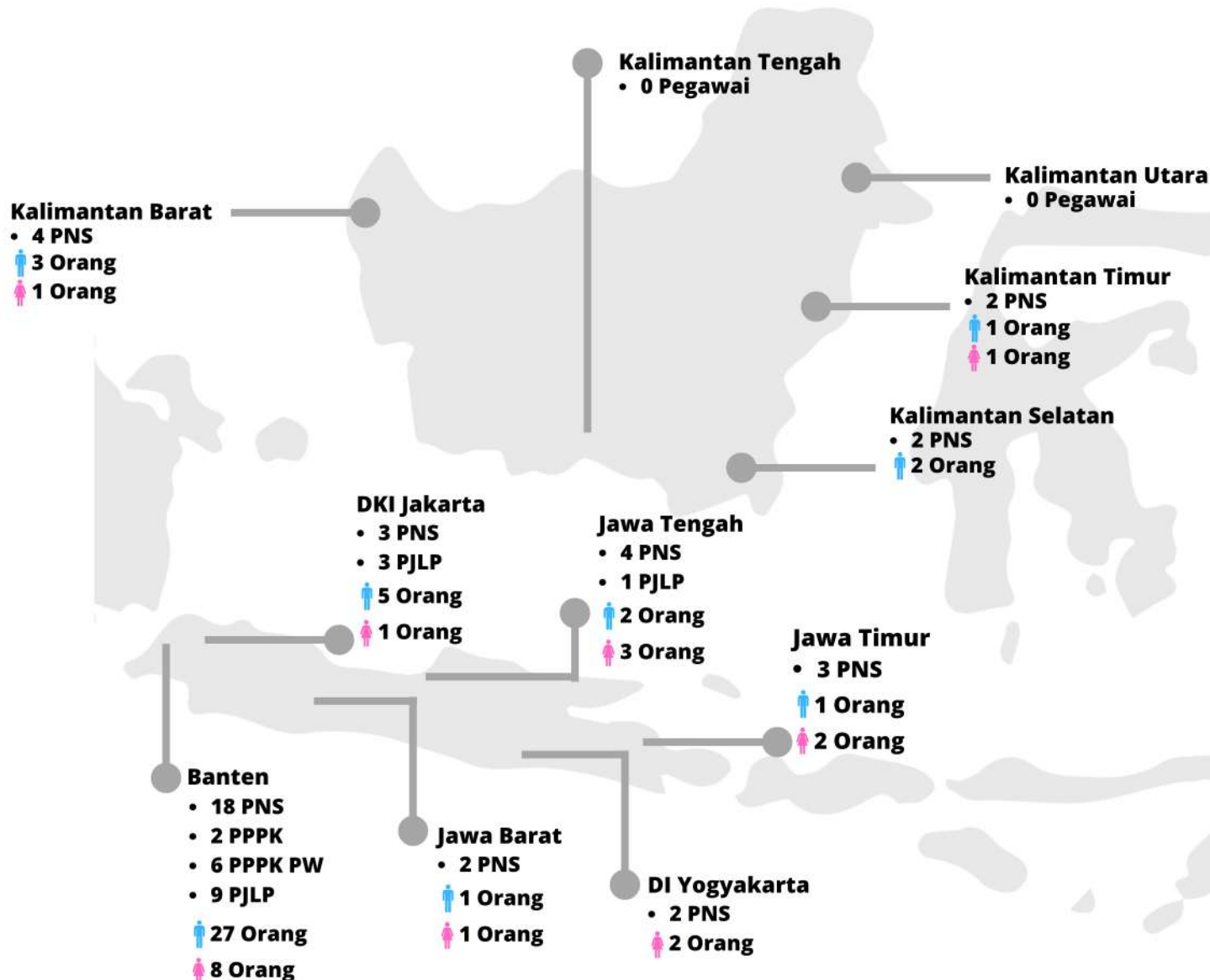




DATA KEPEGAWAIAN

LPRL Serang



Jenis Kelamin Seluruh Pegawai LPRL Serang



Jumlah Pegawai LPRL Serang

PNS	: 39 Orang
PPPK	: 3 Orang
PPPK Paruh Waktu	: 6 Orang
PJLP	: 13 Orang
Total	: 61 Orang



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY
HUNGER

Laporan

KEUANGAN TAHUNAN (AUDITED) TAHUN 2025

LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PESISIR DAN LAUT SERANG

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pandeglang, 31 Desember 2025
Kepala LPSPL Serang

Santoso Budi Widiarto, S.Sos.,M.P
NIP. 19741002 200604 1 001



C.27	Aset Tetap Lainnya	
C.28	Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2,832,529,304 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,832,529,304 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15,951,267,946 atau mencapai 0.00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp0.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp49,819,209,577 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp440,074,100; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp49,379,135,477 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp14,436,628 dan Rp49,804,772,949

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2,796,358,504 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp14,847,613,308 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-12,051,254,804, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp23,815,000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-12,027,439,804.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp45,871,986,311, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-12,027,439,804 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -23,815,000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 15,984,041,442 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp49,804,772,949

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	-	2,832,529,304	-	2,629,830,631
JUMLAH PENDAPATAN		-	2,832,529,304	-	2,629,830,631
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	7,118,157,771	-	6,531,865,403
Belanja Barang	B.2.2	-	7,164,903,855	-	9,454,818,253
Belanja Modal	B.2.3	-	1,668,206,320	-	399,765,131
JUMLAH BELANJA		-	15,951,267,946	-	16,386,448,787

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Persediaan	C.4	169,100	699,500
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		440,074,100	699,500
PIUTANG JANGKA PANJANG			
ASET TETAP			
Tanah	C.6	39,759,850,000	36,930,718,000
Peralatan dan Mesin	C.7	8,229,293,108	6,561,086,788
Gedung dan Bangunan	C.8	8,233,338,475	8,233,338,475
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.9	517,299,000	517,299,000
Aset Tetap Lainnya	C.10	150,365,000	150,365,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(7,511,010,106)	(6,509,826,723)
Jumlah Aset Tetap		49,379,135,477	45,882,980,540
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.12	73,536,500	73,536,500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(73,536,500)	(73,536,500)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		49,819,209,577	45,883,680,040
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	14,436,628	11,693,729
Uang Muka dari KPPN	C.15	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14,436,628	11,693,729
JUMLAH KEWAJIBAN		14,436,628	11,693,729
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	49,804,772,949	45,871,986,311
JUMLAH EKUITAS		49,804,772,949	45,871,986,311
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		49,819,209,577	45,883,680,040

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	2,796,358,504	2,618,331,475
Jumlah Pendapatan		2,796,358,504	2,618,331,475
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	7,118,157,771	6,540,446,903
Beban Persediaan	D.3	34,951,388	99,472,230
Beban Barang dan Jasa	D.4	4,903,244,709	5,182,761,378
Beban Pemeliharaan	D.5	270,523,542	527,594,596
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,519,552,515	3,624,220,900
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	199,765,415
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1,001,183,383	938,334,383
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	-	(42,908)
Jumlah Beban		14,847,613,308	17,112,552,897
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(12,051,254,804)	(14,494,221,422)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.10	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.11	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	23,815,000	11,499,156
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		23,815,000	11,499,156
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(12,027,439,804)	(14,482,722,266)
Pos Luar Biasa	D.13		
0		-	-
0		-	-
0		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(12,027,439,804)	(14,482,722,266)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	45,871,986,311	46,564,987,185
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(12,027,439,804)	(14,482,722,266)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(23,815,000)	24,787,236
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	(23,815,000)	24,787,236
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		(23,815,000)	24,787,236
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	15,984,041,442	13,764,934,156
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		3,932,786,638	(693,000,874)
EKUITAS AKHIR	E.6	49,804,772,949	45,871,986,311

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA***(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO***(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset Lancar

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,832,529,304	-
Jumlah Pendapatan	2,832,529,304	-
Belanja		
Belanja Pegawai	7,557,000,000	-
Belanja Barang	10,717,544,000	-
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	18,274,544,000	-

Realisasi Pendapatan
Rp2,832,529,304

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2,832,529,304 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,832,529,304. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hingga 31 Desember 2025 terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari PNPB senilai Rp. 2.832.529.304 atau persentase 164.49% dari pagu PNPB, dengan rincian sebagai berikut:

1. Akun 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya Rp1.137.990.000
2. Akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Rp1.682.382.500
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasana Sesuai dengan Tusi senilai Rp12.156.804

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	2,832,529,304	-
Jumlah	-	2,832,529,304	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 7.71 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,832,529,304	2,629,830,631	7.71
Jumlah	2,832,529,304	2,629,830,631	7.71

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp2,832,529,304

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp2,832,529,304 dan Rp2,629,830,631. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 7.71 dari TA 2024 Hingga 31 Desember 2025 terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari PNBPN senilai Rp. 2.832.529.304 atau persentase 164.49% dari pagu PNBPN, dengan rincian sebagai berikut:

1. Akun 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya Rp1.137.990.000
2. Akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Rp1.682.382.500
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi senilai Rp12.156.804. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,832,529,304	2,629,830,631	7.71
Jumlah	2,832,529,304	2,629,830,631	7.71

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp15,951,267,946 atau 0.00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.0 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	7,118,157,771	-
Belanja Barang	-	7,164,903,855	-
Belanja Modal	-	1,668,206,320	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	15,951,267,946	-

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 2.66% Terdapat peningkatan realisasi belanja Barang pada TA.2025 bila dibandingkan TA.2024. Realisasai Belanja senilai Rp15.951.267.946 dengan presentase 79,88%. baik pada belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang. . Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	7,118,157,771	6,531,865,403	8.98
Belanja Barang	7,164,903,855	9,454,818,253	(24.22)
Belanja Modal	1,668,206,320	399,765,131	317.30
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	15,951,267,946	16,386,448,787	(2.66)

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp7.118.157.771

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,118,157,771 dan Rp6,531,865,403. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 8.98 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Terdapat Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 Ini Dibanding Tahun Sebelumnya Dikarenakan Adanya Penambahan Pegawai (PPPK) Sebanyak 3 Orang, Kenaikan Pangkat/Golongan Dan Penambahan Jumlah Anggota Keluarga Pegawai Yang Menerima Tunjangan. Jumlah Pegawai LPSPL Serang Hingga 31 Desember 2025 Sebanyak 51 Orang PNS Dan 5 PPPK. Hingga 31 Desember 2025 Ini Terdapat Pengembalian Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Umum PNS Senilai Rp 1.100.150 Pada Semester I Dan Semester III dan pembulatan senilai Rp807,-

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2,449,458,840	2,313,739,150	5.87
Belanja Pembulatan Gaji PNS	37,997	36,706	3.52
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	176,063,600	166,089,770	6.01
Belanja Tunj. Anak PNS	55,215,900	50,772,178	8.75
Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	11,880,000	6.06
Belanja Tunj. Fungsional PNS	179,900,000	157,280,000	14.38
Belanja Tunj. PPh PNS	13,232,572	11,692,993	13.17
Belanja Tunj. Beras PNS	140,132,700	134,556,360	4.14
Belanja Uang Makan PNS	329,118,000	274,205,000	20.03
Belanja Tunjangan Umum PNS	61,290,000	63,040,000	(2.78)
Belanja Uang Lembur	112,342,000	25,965,000	332.67
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,257,801,489	3,124,318,448	4.27
Belanja Gaji Pokok PPPK	118,533,200	76,886,400	54.17
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,579	1,660	55.36
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,922,160	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14,580,000	6,480,000	125.00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,983,100	1,738,080	129.17
Belanja Uang Makan PPPK	18,019,000	10,286,000	75.18
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	166,913,727	102,897,658	62.21
Belanja Tunjangan Anak PPPK	768,864	-	-
Belanja Uang Lembur PPPK	5,688,000	-	-
Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,665,000	-	-
Jumlah Belanja kotor	7,119,268,728	6,531,865,403	8.99
Pengembalian Belanja Pegawai	1,110,957	-	-
Jumlah Belanja	7,118,157,771	6,531,865,403	8.98

Realisasi Belanja
Barang
Rp7,164,903,855

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,164,903,855 dan Rp9,454,818,253. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 24.22% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Tidak terdapat kenaikan belanja barang pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya dikarenakan efisiensi anggaran dan pagu anggaran dalam masa pemblokiran.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	437,908,202	658,589,826	(33.51)
Belanja Barang Non Operasional	1,646,911,920	1,515,872,872	8.64
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34,420,988	98,463,630	(65.04)
Belanja Jasa	3,255,586,688	2,830,574,814	15.02
Belanja Pemeliharaan	270,523,542	527,330,796	(48.70)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,519,552,515	3,624,220,900	(58.07)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	-	199,765,415	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	7,164,903,855	9,454,818,253	(24.22)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	7,164,903,855	9,454,818,253	(24.22)

Realisasi Belanja Modal
Rp1,668,206,320

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,668,206,320 dan Rp399,765,131. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 317.30% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Terdapat peningkatan belanja modal pada Tahun Anggaran 2025 ini dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya karena pada tahun ini terdapat peningkatan belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal peralatan dan mesin berupa paket Sound System Ruangan Meeting Pelayanan, Sarana Ruang Perizinan, Kendaraan, Drone, Alat Pencetak, Media Digital Informasi Pelayanan, Mesin Antrian Konsultasi, Video Conference, Genset, Teropong Binokuler, GPS, Alat Pengolah Data Pelayanan Perizinan, Alat Pengolah Data Hasil Identifikasi dan Verifikasi .

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,668,206,320	399,765,131	317.30
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1,668,206,320	399,765,131	317.30
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1,668,206,320	399,765,131	317.30

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah hingga 31 Desember 2025

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp1,668,206,320

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1,668,206,320 dan Rp399,765,131, mengalami kenaikan sebesar 317.30 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Hingga 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah peralatan dan mesin berupa pembelian Sound System Ruangan Meeting Pelayanan senilai Rp62.500.000, Sarana Ruang Perizinan senilai Rp.102.411.000, Meteran Digital senilai Rp3.190.000, Kendaraan senilai Rp.500.000.000, Drone senilai Rp125.000.000, Alat Pencetak senilai Rp17.000.000, Media Digital Informasi Pelayanan senilai Rp55.500.000, Mesin Antrian Konsultasi Rp23.000.000, Video Conference senilai Rp29.000.000, Genset Rp160.738.000, Teropong Binokuler senilai Rp23.310.000, GPS senilai Rp24.000.000, Pengolah Data Hasil Identifikasi dan Verifikasi senilai Rp350.000.000, Alat Pengolah Data Pelayanan Perizinan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,668,206,320	399,765,131	317.30
Jumlah Belanja Kotor	1,668,206,320	399,765,131	317.30
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1,668,206,320	399,765,131	317.30

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan TA 2025..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Pada 31 Desember 2025 terdapat kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp0

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Hingga 31 Desember 2025 terdapat piutang bukan pajar terkait sewa rumah negara

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0
Persediaan Rp169,100

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo penyisihan piutang tidak tertagih.

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp169,100 dan Rp699,500. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	169,100	699,500
Jumlah	169,100	699,500

Persediaan tersebut di atas dalam Pada 31 Desember 2025 terdapat persediaan senilai Rp169.100,- yang terdiri dari persediaan barang konsumsi seperti Alat Tulis Kantor, Kertas dan lain-lain.

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Tidak terdapat persediaan yang belum diregister hingga 31 Desember 2025

Tanah
Rp39,759,850,000

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp39,759,850,000 dan Rp36,930,718,000. Nilai Tanah tersebut Hingga 31 Desember 2025 terdapat perolehan tanah senilai Rp2.829.132.000,- merupakan Barang Milik Negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang telah ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Berita Acara Nomor BA-266/KN/2025 tanggal 13 November 2025.. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	36,930,718,000
Mutasi tambah :	
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang :	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	36,930,718,000

Peralatan dan Mesin
Rp8,229,293,108

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp8,229,293,108 dan Rp6,561,086,788. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025		6,561,086,788
Mutasi tambah:		
Pembelian		1,668,206,320
Perolehan Lainnya		23,815,000
Mutasi Kurang:		
Saldo per 31 Desember 2025		8,229,293,108
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(5,764,425,565)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		2,464,867,543

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

Hingga 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain : GPS senilai Rp15.384.406, Teropong Binokular senilai Rp19.813.500, Video Conference senilai Rp.28.900.000, Mesin Antrian Konsultasi senilai Rp23.000.000, Media Digital Informasi Pelayanan senilai Rp55.500.000, Alat pencetak dokumen hasil verifikasi pelayanan periziinan senilai Rp14.430.000, Kendaraan FUngsional Pelayanan Perizinan senilai Rp500.000.000, Sarana Ruangan Pelayanan Perizinan senilai 217.617.915, Paket Sound System Ruang Meeting Pelayanan senilai Rp62.500.000, Alat Pengolah Data Hasil Identifikasi dan Verifikasi Lapangan Perizinan Ruang Laut senilai Rp303.969.999, Alat Pengolah Data Pelayanan Perizinan senilai Rp126.137.500, Drone senilai Rp105.450.000, Genset senilai Rp160.506.000, Laptop senilai Rp1.350.373.117,-.

Gedung dan Bangunan
Rp8,233,338,475

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8,233,338,475 dan Rp8,233,338,475. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025		8,233,338,475
Mutasi tambah:		
		-
		-
Mutasi Kurang:		
		-
Saldo per 31 Desember 2025		8,233,338,475
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(1,262,394,952)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		6,970,943,523

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp517,299,000

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.517,299,000 dan Rp.517,299,000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025		517,299,000
Mutasi tambah:		
		-
Mutasi Kurang:		
		-
Saldo per		517,299,000
Akumulasi Penyusutan s.d.		(484,189,589)
Nilai Buku per		33,109,411

Aset Tetap Lainnya
Rp150,365,000

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.150,365,000 dan Rp.150,365,000. Aset tetap tersebut Tidak terdapat kenaikan/penurunan aset tetap lainnya pada Hingga 31 Desember 2025. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025		150,365,000
Mutasi tambah:		
Reklasifikasi Masuk		-
		-
Mutasi Kurang:		
		-
Saldo per 31 Desember 2025		150,365,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		-
Nilai Buku per 31 Desember 2025		150,365,000

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp7,511,010,106

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp7,511,010,106 dan Rp6,509,826,723. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8,229,293,108	(5,764,425,565)	2,464,867,543
2	Gedung dan Bangunan	8,233,338,475	(1,262,394,952)	6,970,943,523
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	517,299,000	(484,189,589)	33,109,411
4	Aset Tetap Lainnya	150,365,000	-	150,365,000
Akumulasi Penyusutan		17,130,295,583	(7,511,010,106)	9,619,285,477

Aset Lain-lain
Rp73,536,500

C.12 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp73,536,500 dan Rp73,536,500. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	73,536,500
Mutasi tambah:	
	-
Saldo Awal	-
Mutasi Kurang:	
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	-
Saldo per 31 Desember 2025	73,536,500
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(73,536,500)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat mutasi kurang aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 73,536,500

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp73,536,500 dan Rp73,536,500. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	73,536,500	(73,536,500)	-
-	-	-	-
Total	73,536,500	(73,536,500)	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp14,436,628

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Terdapat utang kepada pihak ketiga hingga 31 Desember 2025 senilai Rp0,-

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	14,436,628	11,693,729
Total	14,436,628	11,693,729

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat Utang kepada pihak ketiga.

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.15 Uang Muka dari KPPN

Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat uang muka dari KPPN.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat kas di bendahara pengeluaran

Ekuitas
Rp49,804,772,949

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp49,804,772,949. dan Rp45,871,986,311. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp2,796,358,504

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2,796,358,504 dan Rp2,618,331,475. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 6.80. Hal tersebut disebabkan oleh Hingga 31 Desember 2025 terdapat kenaikan pendapatan PNBP senilai Rp. 2.796.358.504 sedangkan pada realisasi anggaran (LRA) senilai Rp. 2.832.529.304 sehingga terdapat selisih senilai Rp36.170.800 dikarenakan adanya pengembalian antara lain:

- pengembalian PNBP pada semester III pada akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya senilai 15.610.800 dikarenakan kelebihan penarikan tarif PNBP pengambilan alam pada tahun 2023 dan adanya pengajuan permohonan pengembalian dari pelaku usaha di tahun 2025
- pengembalian PNBP pada semester III/tahunan pada akun 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya dan akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya senilai Rp20.560.000 salah penggunaan akun SIMPONI saat membuat kode billing oleh PIC Direktorat Konsevasi Spesies dan Genetik dikarenakan pada tanggal 18 November 2025 Bendahara Penerimaan terdapat eror pada system SIMPONI LPSPL Serang sehingga tidak muncul pilihan untuk membuat kode billing, Bendahara Penerimaan meminta bantuan kepada PIC Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik untuk membuka akun LPSPL Serang. PIC Direktorat Konsevasi Spesies dan Genetik kesalahan login akun sehingga ada 16 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) yang dibuat dengan akun SIMPONI LPSPL Serang untuk pembayaran PNBP SAJI LN, Sudah ada 7 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) yang dibayarkan, Karena dibutuhkan penerbitan dokumen SAJI LN dalam waktu dekat, Kembali dibuat 16 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) dengan akun SIMPONI Setditjen PRL, 7 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) yang dibayarkan juga sudah membayarkan Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) dengan akun SIMPONI Setditjen PRL sehingga terdapat dobel pungut pada 2 akun yang berbeda, sehingga dilakukannya pengembalian PNBP kepada pelaku usaha.

. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	12,156,804.00	(100.00)
Pendapatan Jasa Lainnya	1,652,091,700	1,514,159,671.00	9.11

Pendapatan Perizinan Lainnya	1,132,110,000	1,092,015,000.00	3.67
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	2,796,358,504.00	2,618,331,475.00	6.80

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,118,157,771 dan Rp6,540,446,903.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 8.83 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Terdapat Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 Ini Dibanding Tahun Sebelumnya Dikarenakan Adanya Penambahan Pegawai (PPPK) Sebanyak 3 Orang, Kenaikan Pangkat/Golongan Dan Penambahan Jumlah Anggota Keluarga Pegawai Yang Menerima Tunjangan. Jumlah Pegawai LPSPL Serang Hingga 31 Desember 2025 Sebanyak 51 Orang PNS Dan 5 PPPK. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	2,449,458,840	2,322,320,650	5.47
Beban Pembulatan Gaji PNS	37,190	36,706	1.32
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	176,063,600	166,089,770	6.01
Beban Tunj. Anak PNS	55,215,900	50,772,178	8.75
Beban Tunj. Struktural PNS	12,600,000	11,880,000	6.06
Beban Tunj. Fungsional PNS	179,900,000	157,280,000	14.38
Beban Tunj. PPh PNS	13,232,572	11,692,993	13.17
Beban Tunj. Beras PNS	140,132,700	134,556,360	4.14
Beban Uang Makan PNS	329,118,000	274,205,000	20.03
Beban Tunjangan Umum PNS	60,179,850	63,040,000	(4.54)
Beban Uang Lembur	112,342,000	25,965,000	332.67
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,257,801,489	3,124,318,448	4.27
	-	-	-
Jumlah	7,118,157,771	6,540,446,903	8.83

Beban Persediaan
Rp34,951,388

D.3 **Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34,951,388 dan Rp99,472,230

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 64.86 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat peningkatan pada beban persediaan dibandingkan TA sebelumnya.. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	34,951,388	99,407,230	(64.84)
Beban Persediaan bahan baku	-	65,000	(100.00)
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	34,951,388.00	99,472,230	(64.86)

Beban Barang dan Jasa
Rp4,903,244,709

D.4 **Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4,903,244,709 dan Rp5,182,761,378.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 5.39 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat peningkatan pada beban persediaan dibandingkan TA sebelumnya.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	295,696,002	434,968,426	(32.02)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,612,200	6,537,400	(60.04)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	97,800,000	139,194,000	(29.74)
Beban Barang Operasional Lainnya	41,800,000	77,890,000	(46.33)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Bahan	1,646,911,920	1,515,872,872	8.64
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Beban Langganan Listrik	141,493,630	179,548,159	(21.19)
Beban Langganan Telepon	-	-	-
Beban Langganan Air	26,184,260	37,328,728	(29.85)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	75,677,899	84,420,769	(10.36)
Beban Jasa Konsultan	79,500,000	-	-
Beban Sewa	887,732,770	1,107,726,368	(19.86)
Beban Jasa Profesi	153,400,000	192,315,000	(20.24)
Beban Jasa Lainnya	1,454,436,028	1,406,959,656	3.37
Jumlah	4,903,244,709	5,182,761,378.00	(5.39)

D.5 **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp270,523,542 dan Rp527,594,596.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 48.73 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Hingga 31 Desember 2025 Beban pemeliharaan tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Tidak terdapat selisih beban pemeliharaan (LO) dengan realisasi anggaran beban pemeliharaan pada LRA. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	166,883,157	321,669,905	(48.12)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	263,800	(100.00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103,640,385	205,660,891	(49.61)
Jumlah	270,523,542	527,594,596	(48.73)

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.519,552,515

D.6 **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,519,552,515 dan Rp3,624,220,900

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 58.07 persen disebabkan oleh Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat peningkatan Beban Perjalanan Dinas dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Tidak terdapat selisih beban perjalanan dinas (LO) dengan realisasi anggaran perjalanan dinas pada LRA. . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	1,452,316,643	2,842,576,942	(48.91)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,121,275	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	51,114,597	781,643,958	(93.46)
Jumlah	1,519,552,515.00	3,624,220,900	(58.07)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.7 **Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Tidak terdapat beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat hingga 31 Desember 2025

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 100.00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan olehHingga 31 Desember 2025 tidak terdapat peningkatan Beban Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya.. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	199,765,415.00	(100.00)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
Jumlah	-	199,765,415	(100.00)

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1,001,183,383

D.8 **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,001,183,383 dan Rp938,334,383.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	790,435,898	703,134,623	12.42
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	173,370,717	173,370,717	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	22,292,375	44,584,750	(50.00)
Beban Penyusutan Irigasi	14,849,143	14,849,143	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	2,159,900	(100.00)
Beban Penyusutan Jaringan	235,250	235,250	-
Jumah Penyusutan	1,001,183,383	938,334,383	6.70
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1,001,183,383	938,334,383	6.70

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.9 **Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-42,908

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	(42,908)	(100.00)
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-	(42,908)	(100)

Tidak terdapat beban penyisihan piutang tak tertagih hingga 31 Desember 2025

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp23,815,000

D.10 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Tidak terdapat Penjualan Aset Non Lancar hingga 31 Desember 2025

D.11 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat Penyelesaian kewajiban jangka panjang hingga 31 Desember 2025

D.12 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23,815,000 dan Rp11,499,156.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8,581,500.00	(100.00)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2,917,656.00	(100.00)
Jumlah	-	11,499,156	(100.00)

Pos Luar Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat pos luar biasa hingga 31 Desember 2025

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat realisasi belanja penanganan pandemi covid-19

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp45,871,986,311.00*

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.45,871,986,311.00 dan Rp.46,564,987,185.00

*Defisit LO Rp.-
12,027,439,804.00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.-12,027,439,804.00 dan Rp.-14,482,722,266.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-23,815,000 dan Rp.24,787,236 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp0.00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Tidak Terdapat Koreksi Atas Reklasifikasi hingga 31 Desember 2025.

*Selisih Revaluasi Aset
Rp.0.00*

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Tidak terdapat selisih revaluasi aset hingga 31 Desember 2025

*Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp-
23,815,000*

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

koreksi Aset Tetap Non Revaluasi tahun 2025 senilai 23,815,000

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp15,984,041,442

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.15,984,041,442 dan Rp.13,764,934,156. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	15,951,267,946
Diterima dari Entitas Lain	(2,796,358,504)
Jumlah	15,984,041,442

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 15,951,267,946, sedangkan DDEL sebesar Rp 2,796,358,504

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat transfer masuk/ transfer keluar

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Tidak terdapat Pengesahan hibah langsung hingga 31 Desember 2025

Ekuitas Akhir
Rp49.819.209.577.

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2025 yakni senilai Rp49.819.209.577,- dan tahun 2024 yakni senilai Rp45.871.986.311

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tahun anggaran 2025 ini terdapat pagu anggaran senilai Rp19.968.400.000 yang terdiri dari sumber dana Rupiah Murni senilai Rp11.778.400.000 dan PNBPNP senilai Rp8.190.000.000, Pagu Efektif senilai Rp16.605.943.000 dan Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 15.951.267.946 atau mencapai 99.06 %. Realisasi dari sumber dana Rupiah Murni senilai Rp 10.429.415.852 atau 88.55% dari pagu Rupiah Murni Rp11.778.400.000 dan dari sumber dana PNBPNP senilai Rp 5.521.852.094 atau 67.42% dari pagu PNBPNP senilai Rp8.190.000.000. Hingga periode 31 Desember 2025 LPSPL Serang terdapat pagu blokir senilai Rp3.362.457.000 yang terdiri dari sumber dana Rupiah Murni senilai Rp 859.237.000 dan PNBPNP senilai Rp 2.503.220.000. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan Desember 2025 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.796.358.504 atau persentase 164.4% dari dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp 1.700.000.000. Hingga 31 Desember 2025, Capaian Output Satker LPSPL Serang mencapai 100%.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. *Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)*

Hingga 31 Desember 2025 terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari PNBPNP senilai Rp.2.832.529.304 atau persentase 164.4% dari pagu PNBPNP, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Perizinan Lainnya Rp1.1379.990.000
2. Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Rp1.682.382.500
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasana Sesuai dengan Tusi senilai Rp12.156.804

Terdapat pengembalian PNBPNP dari 2 (dua) akun pendapatan negara bukan pajak antara lain:

- pengembalian PNBPNP pada semester III pada akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya senilai 15.610.800 dikarenakan kelebihan penarikan tarif PNBPNP pengambilan alam pada tahun 2023 dan adanya pengajuan permohonan pengembalian dari pelaku usaha di tahun 2025
- - pengembalian PNBPNP pada semester III/tahunan pada akun 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya dan akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya senilai Rp20.560.000 salah penggunaan

akun SIMPONI saat membuat kode billing oleh PIC Direktorat Konsevasi Spesies dan Genetik dikarenakan pada tanggal 18 November 2025 Bendahara Penerimaan terdapat eror pada system SIMPONI LPSPL Serang sehingga tidak muncul pilihan untuk membuat kode billing, Bendahara Penerimaan meminta bantuan kepada PIC Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik untuk membuka akun LPSPL Serang. PIC Direktorat Konsevasi Spesies dan Genetik kesalahan login akun sehingga ada 16 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) yang dibuat dengan akun SIMPONI LPSPL Serang untuk pembayaran PNBP SAJI LN, Sudah ada 7 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) yang dibayarkan, Karena dibutuhkan penerbitan dokumen SAJI LN dalam waktu dekat, Kembali dibuat 16 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) dengan akun SIMPONI Setditjen PRL, 7 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) yang dibayarkan juga sudah membayarkan Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) dengan akun SIMPONI Setditjen PRL sehingga terdapat dobel pungut pada 2 akun yang berbeda, sehingga dilakukannya pengembalian PNBP kepada pelaku usaha.

2. Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)

Terdapat Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) senilai Rp439.905.000,- terkait Sewa Gerai Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut sebanyak 4 lokasi dan sewa Kendaraan Fungsional Layanan di Wilker sebanyak 4 (empat) unit diantara lain:

1. Sewa Gerai Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Banjarbaru Kalimantan Selatan 12 Bulan Januari - Desember 2026 senilai Rp85.555.556,-
2. Sewa Gerai Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Jawa Barat 12 Bulan Januari - Desember 2026 senilai Rp94.444.444,-
3. Sewa Gerai Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Lampung 12 Bulan Januari - Desember 2026 senilai Rp33.000.000,-
4. Sewa Gerai Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut JawaTengah 12 Bulan Januari - Desember 2026 senilai Rp90.825.000,-
5. Sewa Kendaraan Fungsional Layanan di Wilker Jawa Tengah 6 Bulan Januari-Juni 2026 senilai Rp34.020.000,-
6. Sewa Kendaraan Fungsional Layanan di Wilker Jakarta 6 Bulan Januari-Juni 2026 senilai Rp34.020.000,-
7. Sewa Kendaraan Fungsional Layanan di Wilker Banten 6 Bulan Januari-Juni 2026 senilai Rp34.020.000,-
8. Sewa Kendaraan Fungsional Layanan di Wilker Lampung 6 Bulan Januari-Juni 2026 senilai Rp34.020.000,-

3. Matriks Revisi Satuan Kerja Loka PSPL Serang T.A 2025

No	Revisi Ke	Revisi Oleh	Tanggal	Digital Stamp	Pagu	Keterangan
1	Pagu Awal	DJA	2 Desember 2024	8500 8896 0636 5966	16.345.154.000	Pagu Definitif
2	Revisi ke-01	KPA	3 Jan 2025	8500 8896 0636 5966	16.345.154.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
3	Revisi ke-02	KPA	23 Jan 2025	8500 8896 0636 5966	16.345.154.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
4	Revisi ke-03	DJA	23 Feb 2025	0209 2081 4529 0542	16.345.154.000	Efisiensi Inpres No. 1 Tahun 2025
5	Revisi ke-04	Kanwil	28 Feb 2025	0209 2081 4529 0542	16.345.154.000	Revisi pemutakhiran Halaman III DIPA TW I 2025
6	Revisi ke-05	DJA	10 Apr 2025	0209 2081 4529 0542	16.345.154.000	Relaksasi Blokir Kode A (Efisiensi Inpres No. 1 Tahun 2025)
7	Revisi ke-06	Kanwil	15 Apr 2025	0209 2081 4529 0542	16.345.154.000	Revisi pemutakhiran Halaman III DIPA TW II 2025

8	Revisi ke-07	DJA	17 Juni 2025	0909 9612 3472 9383	16.345.154.000	Revisi Buka Blokir Kode 2 Sumber Dana PNBP
9	Revisi ke-08	Kanwil	9 Juli 2025	0909 9612 3472 9383	16.345.154.000	Revisi pemutakhiran Halaman III DIPA TW III 2025
10	Revisi ke-09	KPA	22 Juli 2025	0909 9612 3472 9383	16.345.154.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
11	Revisi ke-10	KPA	10 September 2025	0909 9612 3472 9383	16.345.154.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
12	Revisi ke-11	Kanwil	10 Oktober 2025	0909 9612 3472 9383	16.345.154.000	Revisi pemutakhiran Halaman III DIPA TW IV 2025
13	Revisi ke-12	DJA	31 Oktober 2025	2358 6060 4064 8653	20.345.154.000	Revisi Anggaran Belanja Tambahan PNBP Tahun 2025
14	Revisi ke-13	KPA	10 November 2025	2358 6060 4064 8653	20.345.154.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
15	Revisi ke-14	DJA	19 November 2025	0001 0313 9766 5704	19.968.400.000	Revisi Anggaran Pengurangan Pagu Belanja Pegawai dalam

						rangka Pergeseran antar Satker dan Relaksasi blokir kode A Tahun 2025
16	Revisi ke-15	KPA	05 Desember 2025	0001 0313 9766 5704	19.968.400.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
17	Revisi ke-16	KPA	12 Desember 2025	0001 0313 9766 5704	19.968.400.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan

PENGUNGKAPAN INFORMASI KINERJA TAHUN 2025 PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 (AUDITED)

1. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Satker Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat pada fungsi Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja LPSPL Serang meliputi 8 (delapan) provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. dengan rincian sebagaimana terlampir.

2. Capaian Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun, pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Pelaksanaannya tidak ada Program Nasional pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang melalui 0 program prioritas, 0 kegiatan prioritas, yang tersebar di 0 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp0 dan realisasi sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2365.PBW001							
Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	250,000,000	157,806,369	63.12%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
2366.PBT009							
Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	3,131,144,000	2,545,832,764	81.31%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
2366.RAL001							
Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1,693,856,000	1,668,206,320	98.49%	Unit	10	10	100%

3. Prioritas Nasional 3 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. Pelaksanaannya tidak ada Program Prioritas Nasional pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang dengan jumlah 0 program prioritas, 0 kegiatan prioritas, yang tersebar di 0 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp0 dan realisasi sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

4. Prioritas Nasional 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Pelaksanaannya tidak ada Program Prioritas Nasional pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang dengan jumlah 0 program prioritas, 0 kegiatan prioritas, yang tersebar di 0 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp0 dan realisasi sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

5. Prioritas Nasional 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pelaksanaannya tidak ada Program Prioritas Nasional pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang dengan jumlah 0 program prioritas, 0 kegiatan prioritas, yang tersebar di 0 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp0 dan realisasi sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

6. Prioritas Nasional 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Pelaksanaannya tidak ada Program Prioritas Nasional pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang dengan jumlah 0 program prioritas, 0 kegiatan prioritas, yang tersebar di 0 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp0 dan realisasi sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

7. Prioritas Nasional 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Pelaksanaannya tidak ada Program Prioritas Nasional pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang dengan jumlah 0 program prioritas, 0 kegiatan prioritas, yang tersebar di 0 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp0 dan realisasi sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

8. Prioritas Nasional 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Pelaksanaannya tidak ada Program Prioritas Nasional pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang dengan jumlah 0 program prioritas, 0 kegiatan prioritas, yang tersebar di 0 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp0 dan realisasi sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/Lembaga : (032) Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Unit Organisasi : (07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 Satuan Kerja : (200145) Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
 Lokasi : (2000) Provinsi Banten

Hingga 31 Desember 2025, LPSPL Serang sudah melakukan konversi bobot Capaian Output 100%. Berdasarkan Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker LPSPL Serang Capaian Outputnya sebesar 100%. Pada tahun 2025 ini terdapat 16 Rincian Output (RO) dimana terdiri dari 7 Kegiatan Program Prioritas Nasional (PN) dan 9 Kegiatan Non Prioritas Nasional (PN).

Kode	Kegiatan		Belanja			Output				Keterangan
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program 1	HB program pengelolaan perikanan dan kelautan								
	Kegiatan 1.a	HB.2365 Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil	250,000,000	157,806,369	63.12	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%	- Koordinasi Inovasi peserta MT CPNS berupa hasil identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil lingkup LPSPL Serang - Identifikasi dan Inventarisasi Data dan Informasi Potensi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Provinsi Banten - Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
	Rincian Output 1.a.1	2365.PBW.001 Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar								
	Kegiatan 1.b	HB.2366 Penataan Ruang Laut								- Penilaian Teknis Pemohonan KKPRIL - Verifikasi Lapangan Pemanfaatan Ruang Laut - Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut - Sosialisasi Peningkatan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut - Sosialisasi dan Diskusi Isu Pemanfaatan Ruang Laut lingkup LPSPL Serang - Rapat Koordinasi Pengendalian KKPRIL di Bandung pada tanggal 25-28 Desember 2025 - Sinkronisasi Nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut di Surabaya tanggal 17-18 Desember 2025 - Pembukaan Gera Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut - Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di jalur Pantura (pantai utara Jawa) tanggal 1-9 Desember 2025 - Pengambilan data lapangan Monitoring Ekosistem dan Sosial Ekonomi CSC Sukarame - FGD dan Laporan Akhir Kajian Monitoring Ekosistem dan Sosial Ekonomi CSC Sukarame - Mengikuti pelatihan sertifikasi mediator dan uji kompetensi konsiliator - Menghadiri lokakarya nasional Pemanfaatan Ruang Laut di Jakarta pada tanggal 1-3 Desember 2025 - Mengikuti workshop strategi dan penyelesaian sengketa pelanggaran tata kelola laut - Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut - Koordinasi Penataan Ruang Laut Lingkup Wilayah Kerja LPSPL Serang secara daring pada tanggal 31 Desember 2025 - Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
	Rincian Output 1.b	2366.PBT.009 Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	3,131,144,000	2,545,832,764	81.31	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%	
	Rincian Output 1.b	2366.RAL.001 Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1,693,656,000	1,668,206,320	98.49	10	10	Unit	100%	Telah direalisasikan pembelian sarana sbb: 1. GPS 2. Teropong Binokular 3. Video Conference 4. Mesin Antrian Konsultasi 5. Media Digital Informasi Pelayanan 6. Kendaraan Fungsional Pelayanan Perizinan 7. Drone 8. Paket Sound System Ruang Meeting Pelayanan 9. Genset Gedung Pelayanan Perizinan 10. Alat pengolah data
2	Program 2	FD Program kualitas lingkungan hidup								
	Kegiatan 2.a	FD.2362 pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan								
	Rincian Output 2.a.1	2362.PBW.001 Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	50,000,000	13,636,946	27.27	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%	- Verifikasi titik lokasi dan kondisi BMKT ke Pulau Untung Jawa, Jakarta pada tanggal 7-11 Desember 2025 - Penetapan Kawasan Konservasi Kaur Kepmen KP 77/2025 pada tanggal 1 Desember 2025 - Penilaian EVIKA - Rapat Perumusan Rencana Pengelolaan Konservasi Pantai Bugel secara daring pada tanggal 2 Desember 2025 - BIMTEK Google Earth Engine tingkat menengah untuk pemetaan habitat bentik (blue carbon) di Jakarta pada tanggal 8-10 Desember 2025 - Diskusi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi secara daring pada tanggal 9-10 Desember 2025 - Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
	Rincian Output 2.a.2	2362.PCA.002 Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	1,900,000,000	954,124,900	50.22	2	2	Produk	100%	- Pelayanan rutin penerbitan dokumen perizinan pemanfaatan jenis ikan - Pembahasan Penilaian Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Serang pada tanggal 1 Desember 2025 - Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan
	Rincian Output 2.a.3	2362.PEE.001 Kerjasama, Jejaring dan Kamtibmas Konservasi Ekosistem	100,000,000	31,050,096	31.05	1	1	Kesepakatan	100%	- Koordinasi Pelaksanaan PKS bersama Institut Pertanian Bogor - Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan pelaksanaan PKS dan monitoring PKS

Rincian Output 2.a.4	2362.QMA.002 Data dan Informasi Konservasi Biota Peraliran	665,000,000	56,313,999	8.47	1	1	Dokumen	100%	- Koordinasi dengan pihak Rekam terkait data enumerasi di Jawa Tengah - BIMTEK Monitoring Populasi Ikan Napoleon di Lombok pada tanggal 1-4 Desember 2025 - Sosialisasi hasil COP CITES di Bogor pada tanggal 16 Desember 2025 - Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
Rincian Output 2.a.5	2362.REB.001 Konservasi Biota Peraliran Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif)	250,000,000	60,414,000	24.17	1	1	Jenis	100%	- Penyadartahuan Layanan Jenis Ikan CITES di Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 2025 - Respon Cepat Penanganan Penyus Terdampar di Pandeglang pada tanggal 6 Desember 2025 - Respon Cepat Penanganan Hiu Paus Terdampar di Purworejo pada tanggal 8 Desember 2025 - Respon Cepat Penanganan Lumba-lumbaTerdampar di Pandeglang pada tanggal 8 Desember 2025 - Kickoff Restorasi Shrimp Fisheries of Yayasan TAKA di Kota Semarang pada tanggal 17 Desember 2025 - Sarasehan evaluasi penanganan hiu paus terdampar SEALIFE di Bantul, Purworejo, Kebumen, Cilacap pada tanggal 16-23 Desember 2025 - Transplantasi Karang di Pandeglang pada tanggal 19 Desember 2025 - Konsultasi publik RanPerMen Rig to Fish & Rig to Reef secara daring pada tanggal 1 Desember 2025 - Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
Rincian Output 2.a.6	2362.SCC.002 Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	150,000,000	34,466,700	22.98	30	30	Orang	100%	- Pengambilan data lapangan Monitoring Ekosistem dan Sosial Ekonomi CSC Sukarame 5-7 Desember 2025 - FGD dan Laporan Akhir Kajian Monitoring Ekosistem dan Sosial Ekonomi CSC Sukarame 22 Desember 2025 - Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
Program 3	Program Dukungan Manajemen								
Kegiatan 3.a	Dukungan Manajemen Internal Ligkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut								
Rincian Output 3.a.1	2367.EBA958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	18,000,000	17,462,785	97.13	1	1	Layanan	100%	- Pensiapan Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat - Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
Rincian Output 3.a.2	2367.EBA960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	16,400,000	16,221,100	98.91	1	1	Layanan	100%	- Pemenuhan data dukung WBKWBBSM lingkup LPSPL Serang - Penguatan Sistem Pelayanan Peminzin SIPJI dan Digitalisasi Pelayanan Publik sebagai tindaklanjut rekomendasi KPK di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2025 - Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
Rincian Output 3.a.3	2367.EBA994 Layanan Perkantoran	11,451,800,000	10,109,383,026	88.28	1	1	Layanan	100%	-Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari - Desember 2025 -pembayaran operasional kantor
Rincian Output 3.a.4	2367.EBC954 Layanan Manajemen SDM	209,200,000	205,093,655	98.04	70	70	Orang	9804%	- Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi - Kelengkapan administrasi bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar - Rapat pembahasan usulan jabatan P/JP lingkup Ditjen PRL - Persiapan pengajuan Fasilitas Sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C - Senam Kesehatan Jasmani dan Rohani - Medical Checkup seluruh pegawai LPSPL Serang pada tanggal 15-16 Desember 2025 - Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
Rincian Output 3.a.1	2367.EBD952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6,000,000	5,984,641	99.74	1	1	Dokumen	9974%	- Pembahasan Dokumen Kinerja Level 2 lingkup DJPK - Rencana pembahasan perubahan target pada PK - Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
Rincian Output 3.a.5	2367.EBD953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	42,000,000	41,754,820	99.42	1	1	Dokumen	9942%	- Pembuatan Capaian Output Bulan Desember 2025 - Penyampaian Evaluasi Rencana Aksi bulan Desember 2025 - Pembuatan Laporan SPIP dan MR Triwulan IV - Pembuatan Laporan Bulanan bulan Desember 2025 - Pembuatan LK Triwulan IV - Pembuatan LK Tahunan Tahun 2025 - Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan - Rapat Evaluasi Pelayanan dan Kinerja 2025 secara daring pada tanggal 31 Desember 2025
Rincian Output 3.a.6	2367.EBD955 Layanan Manajemen Keuangan	35,000,000	34,606,782	98.88	1	1	Dokumen	9888%	- Capaian IKPA LPSPL Serang pada periode Oktober sebesar 95,83% - Penyerapan anggaran LPSPL Serang pada November 2025 sebesar Rp 1.256.787.316,- dan realisasi penyerapan anggaran sampai November 2025 sebesar Rp 10.617.061.535,- dengan persentase 52,16% (blokir) dan 63,28% (tanpa blokir) - Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
	Subtotal	19,968,400,000	15,952,378,903	79.89%				1	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)*								
	Total								

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ORGANISASI : 07
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 290145

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BANTEN
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl. Cetak 02/05/2026 6:13 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	699,500	0
0.0	131111	Tanah	36,930,718,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,561,086,788	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	8,233,338,475	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	356,678,000	0
0.0	134112	Irigasi	155,916,000	0
0.0	134113	Jaringan	4,705,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	150,365,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,973,989,667
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,089,024,235
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	334,385,625
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	111,368,571
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,058,625
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	73,536,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	73,536,500
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	11,693,729
0.0	391111	Ekuitas	0	45,871,986,311
JUMLAH			52,467,043,263	52,467,043,263

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 02/05/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 02/05/26 6:10 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	439,905,000	0	439,905,000	0.00
Persediaan	169,100	699,500	(530,400)	(75.83)
JUMLAH ASET LANCAR	440,074,100	699,500	439,374,600	62,812.67
ASET TETAP				
Tanah	39,759,850,000	36,930,718,000	2,829,132,000	7.66
Peralatan dan Mesin	8,229,293,108	6,561,086,788	1,668,206,320	25.43
Gedung dan Bangunan	8,233,338,475	8,233,338,475	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	517,299,000	517,299,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	150,365,000	150,365,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,511,010,106)	(6,509,826,723)	(1,001,183,383)	15.38
JUMLAH ASET TETAP	49,379,135,477	45,882,980,540	3,496,154,937	7.62
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	73,536,500	73,536,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(73,536,500)	(73,536,500)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	49,819,209,577	45,883,680,040	3,935,529,537	8.58
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	14,436,628	11,693,729	2,742,899	23.46
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14,436,628	11,693,729	2,742,899	23.46
JUMLAH KEWAJIBAN	14,436,628	11,693,729	2,742,899	23.46
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	49,804,772,949	45,871,986,311	3,932,786,638	8.57
JUMLAH EKUITAS	49,804,772,949	45,871,986,311	3,932,786,638	8.57
JUMLAH EKUITAS	49,804,772,949	45,871,986,311	3,932,786,638	8.57
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	49,819,209,577	45,883,680,040	3,935,529,537	8.58

Keterangan :

FINAL

Pandeglang, 2 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SANTOSO BUDI WIDIARTO, S.Sos, MP
NIP. 197410022006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 02/05/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 02/05/26 6:09 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	439,905,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	169,100	0
0.0	131111	Tanah	39,759,850,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	8,229,293,108	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	8,233,338,475	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	356,678,000	0
0.0	134112	Irigasi	155,916,000	0
0.0	134113	Jaringan	4,705,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	150,365,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,764,425,565
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,262,394,952
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	356,678,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	126,217,714
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,293,875
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	73,536,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	73,536,500
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	14,436,628
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	15,951,267,946
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,796,358,504	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,829,132,000
0.0	391111	Ekuitas	0	45,871,986,311
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	23,815,000	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	12,156,804
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	1,132,110,000
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	1,652,091,700
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	23,815,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,449,458,840	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	37,190	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	176,063,600	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	55,215,900	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	12,600,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	179,900,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	13,232,572	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	140,132,700	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	329,118,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	60,179,850	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	118,533,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,579	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 02/05/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 02/05/26 6:09 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,922,160	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	768,864	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14,580,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	3,983,100	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	18,019,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	1,665,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	112,342,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	5,688,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,257,801,489	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	166,913,727	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	295,696,002	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,612,200	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	97,800,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	41,800,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,646,911,920	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	141,493,630	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	26,184,260	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	75,677,899	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	79,500,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	887,732,770	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	153,400,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,454,436,028	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	166,883,157	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103,640,385	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,452,316,643	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,121,275	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	51,114,597	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	790,435,898	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	173,370,717	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	22,292,375	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	14,849,143	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	235,250	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	34,951,388	0
JUMLAH			75,071,542,995	75,071,542,995

Keterangan :
FINAL



Pandeglang, 2 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

SANTOSO BUDI WIDIARTO, S.Sos, MP
NIP. 197410022006041001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT 07
SATUAN KERJA : LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG 290145

Tgl Data : 02/05/26 1:26 AM
Tgl Cetak : 02/05/26 6:10 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,700,000,000	2,796,358,504	1,096,358,504	164	1,216,260,000	2,629,830,631	(1,413,570,631)	216
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,700,000,000	2,796,358,504	1,096,358,504	164	1,216,260,000	2,629,830,631	(1,413,570,631)	216
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,700,000,000	2,796,358,504	1,096,358,504	164	1,216,260,000	2,629,830,631	(1,413,570,631)	216
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	19,968,400,000	15,951,267,946	(4,017,132,054)	80	16,542,545,000	16,386,448,787	156,096,213	99
1. Belanja Pegawai	7,557,000,000	7,118,157,771	(438,842,229)	94	6,538,027,000	6,531,865,403	6,161,597	100
2. Belanja Barang	10,717,544,000	7,164,903,855	(3,552,640,145)	67	9,604,518,000	9,454,818,253	149,699,747	98
3. Belanja Modal	1,693,856,000	1,668,206,320	(25,649,680)	98	400,000,000	399,765,131	234,869	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT 07
SATUAN KERJA : LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG 290145

Tgl Data : 02/05/26 1:26 AM
Tgl Cetak : 02/05/26 6:10 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	19,968,400,000	15,951,267,946	(4,017,132,054)	80	16,542,545,000	16,386,448,787	156,096,213	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Pandeglang, 2 Mei 2026

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
LOKA PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
SANTOSO BUDI WIDIARTO, S.Sos, MP
NIR.197410022006041001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 032
: 07
: 2900
: 290145
: KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BANTEN
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 02/05/26 6:15 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 2/5/26 2:03 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,352,000,000	2,452,335,000	2,449,458,840	0	2,449,458,840	99.88	2,876,160
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	216,000	190,000	37,997	807	37,190	19.57	152,810
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	154,000,000	177,199,000	176,063,600	0	176,063,600	99.36	1,135,400
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	53,144,000	56,441,000	55,215,900	0	55,215,900	97.83	1,225,100
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	175,000,000	180,680,000	179,900,000	0	179,900,000	99.57	780,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,050,000	13,595,000	13,232,572	0	13,232,572	97.33	362,428
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	137,200,000	140,589,000	140,132,700	0	140,132,700	99.68	456,300
511129	Belanja Uang Makan PNS	401,736,000	389,196,000	329,118,000	0	329,118,000	84.56	60,078,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	64,890,000	64,530,000	61,290,000	1,110,150	60,179,850	93.26	4,350,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,351,836,000	3,487,355,000	3,417,049,609	1,110,957	3,415,938,652	97.95	71,416,348
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	147,392,000	147,392,000	118,533,200	0	118,533,200	80.42	28,858,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12,000	12,000	2,579	0	2,579	21.49	9,421
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	1,925,000	1,922,160	0	1,922,160	99.85	2,840
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	770,000	768,864	0	768,864	99.85	1,136
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	14,580,000	14,580,000	0	14,580,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,346,000	4,346,000	3,983,100	0	3,983,100	91.65	362,900
511628	Belanja Uang Makan PPPK	35,000,000	28,720,000	18,019,000	0	18,019,000	62.74	10,701,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	1,665,000	1,665,000	0	1,665,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	193,310,000	199,410,000	159,473,903	0	159,473,903	79.97	39,936,097
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	101,600,000	152,400,000	112,342,000	0	112,342,000	73.72	40,058,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	6,280,000	5,688,000	0	5,688,000	90.57	592,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	101,600,000	158,680,000	118,030,000	0	118,030,000	74.38	40,650,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,869,826,000	3,512,507,000	3,257,801,489	0	3,257,801,489	92.75	254,705,511
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	211,428,000	199,048,000	166,913,727	0	166,913,727	83.86	32,134,273
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	4,081,254,000	3,711,555,000	3,424,715,216	0	3,424,715,216	92.27	286,839,784
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	7,728,000,000	7,557,000,000	7,119,268,728	1,110,957	7,118,157,771	94.19	438,842,229
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 032
: 07
: 2900
: 290145
: KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BANTEN
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 02/05/26 6:15 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 2/5/26 2:03 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52111	Belanja Keperluan Perkantoran	393,212,000	416,098,000	295,696,002	0	295,696,002	71.06	120,401,998
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,200,000	9,264,000	2,612,200	0	2,612,200	28.2	6,651,800
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	135,120,000	97,800,000	97,800,000	0	97,800,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	86,800,000	85,240,000	41,800,000	0	41,800,000	49.04	43,440,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	628,332,000	608,402,000	437,908,202	0	437,908,202	71.98	170,493,798
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	784,744,000	2,152,784,000	1,646,911,920	0	1,646,911,920	76.5	505,872,080
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	784,744,000	2,152,784,000	1,646,911,920	0	1,646,911,920	76.5	505,872,080
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	72,000,000	72,000,000	34,420,988	0	34,420,988	47.81	37,579,012
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	72,000,000	72,000,000	34,420,988	0	34,420,988	47.81	37,579,012
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	192,000,000	144,036,000	141,687,962	0	141,687,962	98.37	2,348,038
522113	Belanja Langganan Air	57,600,000	26,184,000	25,911,652	0	25,911,652	98.96	272,348
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	114,000,000	86,388,000	73,013,276	0	73,013,276	84.52	13,374,724
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	80,110,000	79,500,000	0	79,500,000	99.24	610,000
522141	Belanja Sewa	785,230,000	1,471,882,000	1,327,637,770	0	1,327,637,770	90.2	144,244,230
522151	Belanja Jasa Profesi	145,400,000	263,908,000	153,400,000	0	153,400,000	58.13	110,508,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,545,492,000	1,907,850,000	1,454,436,028	0	1,454,436,028	76.23	453,413,972
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,839,722,000	3,980,358,000	3,255,586,688	0	3,255,586,688	81.79	724,771,312
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	484,760,000	437,957,000	166,883,157	0	166,883,157	38.1	271,073,843
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	237,402,000	247,473,000	103,640,385	0	103,640,385	41.88	143,832,615
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	722,162,000	685,430,000	270,523,542	0	270,523,542	39.47	414,906,458
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,045,725,000	2,790,626,000	1,452,316,643	0	1,452,316,643	52.04	1,338,309,357
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	275,400,000	179,350,000	16,121,275	0	16,121,275	8.99	163,228,725
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	249,069,000	248,594,000	51,114,597	0	51,114,597	20.56	197,479,403
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,570,194,000	3,218,570,000	1,519,552,515	0	1,519,552,515	47.21	1,699,017,485
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	8,617,154,000	10,717,544,000	7,164,903,855	0	7,164,903,855	66.85	3,552,640,145
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,693,856,000	1,668,206,320	0	1,668,206,320	98.49	25,649,680
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA	: 032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	: 07	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Tanggal	: 02/05/26 6:15 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 2900	BANTEN	Halaman	: 3
SATUAN KERJA	: 290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data	: 2/5/26 2:03 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	1,693,856,000	1,668,206,320	0	1,668,206,320	98.49	25,649,680
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	1,693,856,000	1,668,206,320	0	1,668,206,320	98.49	25,649,680
	JUMLAH BELANJA	16,345,154,000	19,968,400,000	15,952,378,903	1,110,957	15,951,267,946	79.88	4,017,132,054

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SATUAN KERJA

: 032
: 290145

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 02/05/26 6:15 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
51111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,352,000,000	2,452,335,000	2,449,458,840	0	2,449,458,840	99.88	2,876,160
51119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	216,000	190,000	37,997	807	37,190	19.57	152,810
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	154,000,000	177,199,000	176,063,800	0	176,063,800	99.36	1,135,400
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	53,144,000	56,441,000	55,215,900	0	55,215,900	97.83	1,225,100
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	175,000,000	180,680,000	179,900,000	0	179,900,000	99.57	780,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,050,000	13,595,000	13,232,572	0	13,232,572	97.33	362,428
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	137,200,000	140,589,000	140,132,700	0	140,132,700	99.68	456,300
511129	Belanja Uang Makan PNS	401,736,000	389,196,000	329,118,000	0	329,118,000	84.56	60,078,000
511131	Belanja Tunjangan Umum PNS	64,890,000	64,530,000	61,290,000	1,110,150	60,179,850	93.26	4,350,150
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	147,392,000	147,392,000	118,533,200	0	118,533,200	80.42	28,858,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12,000	12,000	2,579	0	2,579	21.49	9,421
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	1,925,000	1,922,160	0	1,922,160	99.85	2,840
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	770,000	768,864	0	768,864	99.85	1,136
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	14,580,000	14,580,000	0	14,580,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,346,000	4,346,000	3,983,100	0	3,983,100	91.65	362,900
511628	Belanja Uang Makan PPPK	35,000,000	28,720,000	18,019,000	0	18,019,000	62.74	10,701,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	1,665,000	1,665,000	0	1,665,000	100	0
512211	Belanja Uang Lembur	101,600,000	152,400,000	112,342,000	0	112,342,000	73.72	40,058,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	6,280,000	5,688,000	0	5,688,000	90.57	592,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,869,826,000	3,512,507,000	3,257,801,489	0	3,257,801,489	92.75	254,705,511
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	211,428,000	199,048,000	166,913,727	0	166,913,727	83.86	32,134,273
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	7,728,000,000	7,557,000,000	7,119,268,728	1,110,957	7,118,157,771	94.21	438,842,229
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	393,212,000	416,098,000	295,696,002	0	295,696,002	71.06	120,401,998
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,200,000	9,264,000	2,612,200	0	2,612,200	28.2	6,651,800
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	135,120,000	97,800,000	97,800,000	0	97,800,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	86,800,000	85,240,000	41,800,000	0	41,800,000	49.04	43,440,000
521211	Belanja Bahan	436,354,000	698,472,000	483,149,000	0	483,149,000	69.17	215,323,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	72,000,000	72,000,000	34,420,988	0	34,420,988	47.81	37,579,012
522111	Belanja Langganaan Listrik	192,000,000	144,036,000	141,687,962	0	141,687,962	98.37	2,348,038
522113	Belanja Langganaan Air	57,600,000	26,184,000	25,911,652	0	25,911,652	98.96	272,348
522119	Belanja Langganaan Daya dan Jasa Lainnya	114,000,000	86,388,000	73,013,276	0	73,013,276	84.52	13,374,724
522141	Belanja Sewa	712,180,000	592,966,000	563,771,648	0	563,771,648	95.08	29,194,352
522151	Belanja Jasa Profesi	42,800,000	19,600,000	16,800,000	0	16,800,000	85.71	2,800,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,064,726,000	1,083,922,000	1,061,178,028	0	1,061,178,028	97.9	22,743,972
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	484,760,000	437,957,000	166,883,157	0	166,883,157	38.1	271,073,843
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	237,402,000	247,473,000	103,640,385	0	103,640,385	41.88	143,832,615

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 02/05/26 6:15 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SATUAN KERJA : 290145 LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	365,000,000	184,000,000	183,029,186	0	183,029,186	99.47	970,814
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20,000,000	20,000,000	19,864,597	0	19,864,597	99.32	135,403
	JUMLAH BELANJA BARANG	4,427,154,000	4,221,400,000	3,311,258,081	0	3,311,258,081	78.44	910,141,919
	JUMLAH RUPIAH MURNI	12,155,154,000	11,778,400,000	10,430,526,809	1,110,957	10,429,415,852	88.56	1,348,984,148
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	348,390,000	1,454,312,000	1,163,762,920	0	1,163,762,920	80.02	290,549,080
522131	Belanja Jasa Konsultansi	0	80,110,000	79,500,000	0	79,500,000	99.24	610,000
522141	Belanja Jasa Sewa	73,050,000	878,916,000	763,866,122	0	763,866,122	86.91	115,049,878
522151	Belanja Jasa Profesi	102,600,000	244,308,000	136,600,000	0	136,600,000	55.91	107,708,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	480,766,000	823,928,000	393,258,000	0	393,258,000	47.73	430,670,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,680,725,000	2,608,626,000	1,269,287,457	0	1,269,287,457	48.69	1,337,338,543
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	275,400,000	179,350,000	16,121,275	0	16,121,275	8.99	163,228,725
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	229,069,000	228,594,000	31,250,000	0	31,250,000	13.67	197,344,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	4,190,000,000	6,496,144,000	3,853,645,774	0	3,853,645,774	59.32	2,642,498,226
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,693,856,000	1,668,206,320	0	1,668,206,320	98.49	25,649,680
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	1,693,856,000	1,668,206,320	0	1,668,206,320	98.49	25,649,680
	JUMLAH PNBPN	4,190,000,000	8,190,000,000	5,521,852,094	0	5,521,852,094	67.42	2,668,147,906
	TOTAL	16,345,154,000	19,968,400,000	15,952,378,903	1,110,957	15,951,267,946	79.89	4,017,132,054

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 290145

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BANTEN
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 02/05/26 6:18 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	0	12,156,804	0	12,156,804	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	12,156,804	0	12,156,804	
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	931,500,000	1,137,990,000	5,880,000	1,132,110,000	121.54
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	931,500,000	1,137,990,000	5,880,000	1,132,110,000	121.54
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252					
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	768,500,000	1,682,382,500	30,290,800	1,652,091,700	214.98
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	768,500,000	1,682,382,500	30,290,800	1,652,091,700	214.98
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	1,700,000,000	2,832,529,304	36,170,800	2,796,358,504	164.49
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,700,000,000	2,832,529,304	36,170,800	2,796,358,504	164.49
	JUMLAH PENDAPATAN	1,700,000,000	2,832,529,304	36,170,800	2,796,358,504	164.49

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 02/05/26 1:26 AM
Tgl Cetak : 02/05/26 6:12 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,796,358,504	2,618,331,475	178,027,029	6.799
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,796,358,504	2,618,331,475	178,027,029	6.799
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,796,358,504	2,618,331,475	178,027,029	6.799
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,118,157,771	6,540,446,903	577,710,868	8.833
Beban Persediaan	34,951,388	99,472,230	(64,520,842)	(64.863)
Beban Barang dan Jasa	4,903,244,709	5,182,761,378	(279,516,669)	(5.393)
Beban Pemeliharaan	270,523,542	527,594,596	(257,071,054)	(48.725)
Beban Perjalanan Dinas	1,519,552,515	3,624,220,900	(2,104,668,385)	(58.072)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	199,765,415	(199,765,415)	(100)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 02/05/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 02/05/26 6:12 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,001,183,383	938,334,383	62,849,000	6.698
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(42,908)	42,908	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	14,847,613,308	17,112,552,897	(2,264,939,589)	(13.236)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(12,051,254,804)	(14,494,221,422)	2,442,966,618	(16.855)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	23,815,000	11,499,156	12,315,844	107.102
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	23,815,000	11,499,156	12,315,844	107.102
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	23,815,000	11,499,156	12,315,844	107.102
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(12,027,439,804)	(14,482,722,266)	2,455,282,462	(16.953)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(12,027,439,804)	(14,482,722,266)	2,455,282,462	(16.953)

Keterangan :

FINAL

Pandeglang, 2 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA




SANTOSO BUDI WIDIARTO, S.Sos, MP
NIP 197410022006041001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 02/05/26 12:34 AM

Tgl Cetak : 02/05/26 6:10 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	45,871,986,311	46,564,987,185	(693,000,874)	(1.49)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(12,027,439,804)	(14,482,722,266)	2,455,282,462	(16.95)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(23,815,000)	24,787,236	(48,602,236)	(196.08)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(23,815,000)	24,787,236	(48,602,236)	(196.08)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	15,984,041,442	13,764,934,156	2,219,107,286	16.12
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	3,932,786,638	(693,000,874)	4,625,787,512	(667.5)
EKUITAS AKHIR	49,804,772,949	45,871,986,311	3,932,786,638	8.57

Keterangan :

FINAL

Pandeglang, 2 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



4. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAPA) SEMESTERAN / TAHUNAN TA 2025

Kode dan Nama K/L : (290145) Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	V	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	V	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan tindak lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat kesalahan)		V
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V
5	Terdapat Ketidakesesuaian Akun vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (jika ada, sebutkan alasan dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V
9	Ketidakesesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (jika ada, sebutkan alasan dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V
10	Terdapat Pendapatan Belum di setlor hutang per tanggal pelaporan dan Belum melakukan Penyesuaian Piutang		V
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V

	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNB		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak

11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah		V	
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	V		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	V		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	V		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	V		Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak

2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	V		Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		V	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		V	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	V		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	V		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh : Pengungkapan 391110 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp400.000.000, transaksi Kenaikan Nilai/Ekuitas senilai Rp54.500.000 dengan dokumen sumber	V		Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya

1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	V		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	V		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	V		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	V		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	V		Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	V		Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	V		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		V	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	V		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	V		Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	V		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	V		Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213	V		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	V		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	V		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	V		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	V		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	V		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	V		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN	
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk</i>	
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  (Rostiyani, S.Ak) NIP. 19921027 202521 2034	Pandeglang, 4 April 2026 Penelaah,  (Wiara Marup, S.Sos., M.Si) NIP. 19791009 201403 1 001